

33 Juta Warga DIY-Jateng Ikut JKN-KIS

UNGERAN (KR) - Hingga Juli 2021 lebih dari 33 juta (83 persen) warga DIY-Jateng telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS). Saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedepuitan Wilayah Jateng-DIY terus berupaya mencapai target Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) 95 persen pada 2024.

Hal tersebut diungkapkan Asisten Deputi Bidang Penilaian Kinerja Kantor Cabang (PKKC) BPJS Kesehatan Kedepuitan Wilayah Jateng-DIY Upik Handayani dalam media gathering BPJS Kesehatan Kedepuitan Wilayah Jateng-DIY di The Wujil Resort and Convention Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, Senin (20/9). Sampai saat ini masih ada 7,1 juta warga di DIY-Jateng yang belum menjadi peserta

JKN/KIS. "Upaya tentu terus kita lakukan. Mengingat pentingnya menjadi peserta JKN/KIS. Namun, kita tidak boleh melupakan yang 33 juta itu. Jangan sampai menunggak, sehingga tidak dapat menikmati manfaat," ujarnya. Dari 33 juta peserta tersebut, komposisi terbesar ada di segmen PBI APBN (53 persen), Pekerja Penerima Upah atau PPU (24 persen), Pekerja

Bukan Penerima Upah/PBPU atau peserta mandiri (13 persen), PBI APBD (8 persen) dan Bukan Peserta atau BP seperti pensiunan (2 persen).

Sementara itu berdasarkan biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan BPJS Kesehatan hingga Juli 2021 sebesar Rp 8,8 triliun. Paling besar untuk Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) Rp 4,384 miliar, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) Rp 2,968 miliar, Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Rp 1,357 miliar Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) Rp 86 juta dan promotif preventif Rp 54 juta. Untuk jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di DIY-Jateng sebanyak 3.339 FKTP dan 353 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Hingga Agustus 2021 rata-rata capaian kolektibilitas untuk segmen PBPU terus meningkat. Jika pada Januari hanya 39,43 persen, Februari langsung meningkat tajam hingga 75,49 persen. Capaian tersebut terus naik hingga Agustus dengan 78,39 persen.

"Kami terus berupaya untuk mengatasi tunggakan iuran di segmen PBPU atau peserta mandiri. Mulai dari kemudahan pembayaran dengan menyediakan berbagai kanal pembayaran, sistem autodebet hingga reminder ke peserta," jelas Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedepuitan Wilayah Jateng-DIY Dwi Martiningsih didampingi Asisten Deputi Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Wahyu Giyanto. (Awh)-d

BI, BANK BPD DIY, DINAS PARIWISATA DIY Kembangkan Visiting Jogja, Hidupkan Pariwisata

YOGYA (KR) - Sektor pariwisata di DIY kembali menggeliat setelah level PPKM diturunkan. Namun langkah preventif tetap harus dijalankan demi mencegah penyebaran Covid-19 yang masih perlu terus diwaspadai. Protokol kesehatan dapat diterapkan salah satunya dengan metode transaksi non-tunai. Kerja sama Bank Indonesia, Bank BPD DIY, dan Dinas Pariwisata DIY telah melahirkan layanan pembayaran non tunai melalui aplikasi Visiting Jogja.

"Melalui aplikasi berbasis sistem operasi Android, wisatawan dapat pesan tiket masuk destinasi wisata secara online. Beberapa waktu lalu, telah dilakukan penandatanganan kerja sama antara PT Bank BPD DIY dengan Dinas Pariwisata DIY untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Bentuk kerja sama itu di antaranya diimplementasikan dalam program integrasi aplikasi Visiting Jogja dengan QRIS BPD DIY," kata Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad, Senin (20/9).

Santoso mengatakan, integrasi itu sebagai penambahan menu sistem pembayaran dalam aplikasi Visiting Jogja untuk reservasi tiket



KR-Istimewa

Fasilitas QRIS Bank BPD DIY di Balkondes Sambirejo.

secara online melalui scan QRIS yang diterbitkan Bank BPD DIY, dalam rangkaian uji coba pembukaan tempat wisata di DIY. Aplikasi Visiting Jogja menjadi solusi bagi pengelola destinasi wisata, mengingat salah satu syarat uji coba pembukaan destinasi wisata yaitu wisatawan dapat melakukan reservasi online.

"Hal ini memberikan kemudahan, keamanan, serta kenyamanan bagi wisatawan karena pembelian tiket dapat dilakukan sebelum berkunjung ke objek wisata. Pembayaran juga dapat dilakukan secara online dan seketika (real time)," terang Santoso. (Ria)-d

Menurut Santoso, setelah wisatawan melakukan reservasi tiket secara online dengan memasukkan jumlah tiket yang akan dibeli, aplikasi Visiting Jogja akan mengelola QRIS yang dapat diunduh dan otomatis tersimpan di galeri handphone. Selanjutnya, wisatawan tinggal membuka aplikasi Mobile Banking Bank BPD DIY, mobile banking bank lain, atau aplikasi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) seperti fintech yang telah memiliki fitur scan QRIS. Ini merupakan implementasi fitur QRIS Tanpa Tatap Muka (TTM) yang memungkinkan berjalannya transaksi dari jarak jauh. (Ria)-d



KR-Aliék Widyastuti H

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jateng-DIY (tengah) dalam media gathering di Ungaran.

4 Destinasi Sambungan hal 1

Dispar DIY berkolaborasi melibatkan Dispar Kabupaten/Kota karena lokasi tempat wisata tersebut berada di Kabupaten/Kota, sehingga dituntut peran aktif Dispar Kabupaten/Kota terkait dalam melakukan koordinasi dan monitoring. Pihaknya berharap dengan adanya uji coba destinasi wisata tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga memberikan manfaat bagi bangkitnya industri pariwisata di DIY.

"Kita ingin pariwisata DIY secara umum dibuka kembali dengan tingkat capaian vaksinasi Covid-18 yang tinggi dan kasus positif aktifnya semakin turun. Sebab persiapan reaktivasi pariwisata melalui uji coba ini akan menentukan nasib industri pariwisata DIY kedepannya. Kami sangat berharap uji coba ini berhasil sehingga akan diikuti tempat wisata yang lain supaya kesehatan dan ekonomi bisa berjalan beriringan," imbuh Singgih

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji mengatakan, kebijakan dari Kementerian Pariwisata untuk menambah 4 destinasi wisata dalam uji coba pembukaan usaha pariwisata direspons positif oleh Pemda DIY. Karena dengan adanya tamba-

han empat destinasi wisata ada tujuh destinasi wisata yang saat ini diperbolehkan diuji coba. Dengan dibukanya tujuh destinasi wisata tersebut maka Pemkab/Pemkot diharapkan menyiapkan sarana dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya jaringan internet harus lebih stabil, sehingga setiap wisatawan bisa mengakses aplikasi PeduliLindungi yang jadi syarat masuk ke destinasi wisata. Hal itu penting untuk mengantisipasi adanya gangguan jaringan seperti yang sempat dikeluhkan beberapa pengunjung saat datang ke destinasi wisata.

"Sejak dilakukan uji coba di beberapa destinasi wisata sempat muncul keluhan dari wisatawan. Mereka terkendala sinyal untuk masuk destinasi wisata karena ketiadaan jaringan internet. Ketersediaan internet bisa dibantu dengan wifi di obyek wisata sehingga bisa langsung konek. Dengan begitu mereka bisa mengakses aplikasi PeduliLindungi yang menjadi syarat masuk di destinasi pariwisata. Tentunya semua itu harus diimbangi dengan penegakkan Prokes yang ketat," terang Baskara Aji. (Ira/Ria)-d

Sistem Sambungan hal 1

Sedangkan untuk jenjang SMA, terdapat sekolah yang telah menggelar PTM terbatas, seperti SMAN 6 Yogyakarta. Sedangkan sekolah lainnya, menunda PTM karena ada penilaian tangan semester.

"Setelah dipastikan semua persyaratan terpenuhi dan 88 persen lebih siswa sudah divaksin dan guru hampir 100 persen. Akhirnya kami memutuskan untuk mengadakan PTM terbatas. Untuk waktu kami sengaja memilih tanggal 20 September karena siswa banyak yang merindukan PTM terbatas dengan Prokes ketat. Sesuai dengan ketentuan yang ada satu hari dibagi dalam dua shift. Sehingga satu kelas diisi maksimal 18 siswa," kata Kepala SMAN 6 Yogyakarta Siti Hajarwati di ruang kerjanya, Senin (20/9).

Hajarwati menyatakan, guna memastikan PTM bisa dilaksanakan dengan baik dan Prokes ketat. Sekolah mengoptimalkan keberadaan Satgas Covid-19 dan pakar kesehatan dari UGM serta TNI untuk membantu mereka menyiapkan PTM. Dengan demikian kesiapan sekolah dalam PTM kali ini benar-benar sesuai Standart Operational Procedure (SOP). Tentunya siswa yang mengikuti PTM terbatas wajib mendapatkan izin dari orangtua. Jadi bagi yang tidak diizinkan oleh orangtua akan dilayani secara daring.

Salah satu siswa kelas XI MIPA SMAN 6 Yogyakarta Sasa Putri mengaku sangat senang bisa mengikuti PTM di sekolah. Karena selama ini dirinya lebih banyak mengikuti pembelajaran secara daring dibandingkan PTM di sekolah. (Ria)-d

Dedikasi Sambungan hal 1

dirawat di rumah sakit. Program yang semula ditolak sebagian warga dan menimbulkan kontroversi, akhirnya terbukti berhasil dan menjadi terobosan baru bidang kesehatan yang mencengangkan berbagai kalangan.

Sudah sepiantasnya masyarakat Indonesia bangga. Tidak banyak peneliti di Indonesia yang memperlihatkan dedikasi dan reputasi seperti Prof Utari. Di Indonesia harus diakui hingga saat ini menjadi peneliti belum dipandang sebagai profesi yang membanggakan. Masih banyak dosen PT yang lebih memilih menjadi selebriti akademik, menjadi komisaris perusahaan atau menjadi konsultan politik.

Sejumlah faktor melatarbelakangi kenapa hasrat dosen di Indonesia untuk meneliti kurang. Pertama, karena rendahnya dukungan dan alokasi dana untuk penelitian di Indonesia. Menurut data Kementerian Keuangan (2019), selama ini alokasi dana riset masih di bawah satu persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kedua, belum berkembangnya kultur akademik yang menempatkan dedikasi dan reputasi peneliti sebagai fondasi utama dunia akademik. Meski Kemenristek-Dikti atau Kemendikbud telah mengalokasikan dana untuk penelitian, tetapi apresiasi terhadap ker-

ja penelitian harus diakui masih kurang. Di Indonesia, peneliti belum menjadi profesi yang membanggakan dan layak secara sosial maupun ekonomi. Ketiga, orientasi para dosen di berbagai PT terhadap aktivitas penelitian masih kurang. Dosen umumnya lebih banyak disibukkan dengan kegiatan mengajar dan kegiatan administrasi.

Hingga tahun 2019, dari 4.607 perguruan tinggi serta 177.000 dosen dan peneliti yang terdaftar di Science and Technology Index (Sinta), Indonesia ternyata hanya mampu menghasilkan 34.007 artikel jurnal yang terindeks Scopus. Rendahnya publikasi ilmiah para peneliti Indonesia salah satunya disebabkan minimnya pemahaman dan minat penelitian.

Membangun dedikasi dan reputasi seorang peneliti yang mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia harus diakui bukan hal yang mudah. Di Indonesia, kebanyakan dosen hanya menghasilkan karya ketika meneruskan kuliah, yakni pada saat mereka menulis tesis atau disertasi. Tidak banyak dosen yang tekun meneliti dan menuliskan apa yang dihasilkan, serta menerapkannya di masyarakat agar kemanafaatannya bisa dirasakan dalam praktik. Akibat beban akademik dan tugas administratif yang terlalu berat, seringkali waktu dosen

hanya dihabiskan untuk mengajar.

Ruang bagi dosen untuk melakukan penelitian umumnya kurang. Lebih dari sekadar penghargaan dalam bentuk KUM untuk kenaikan pangkat. Membangun dedikasi dan reputasi peneliti dari PT perlu diwujudkan dalam bentuk pemberian penghargaan yang relevan. Artinya, pemerintah sejak dini perlu menumbuhkembangkan atmosfer dan hasrat untuk meneliti sejak dini.

Penelitian dan inovasi penelitian yang brilian, tidaklah mungkin muncul secara instan. Membangun budaya meneliti perlu ditumbuhkan sejak dini. Sejak masih pelajar atau mahasiswa, hasrat untuk terlibat dalam kegiatan penelitian yang bermutu perlu terus dipupuk melalui berbagai event lomba dan proses pembelajaran yang tepat.

Kultur akademik dan keinginan untuk menghasilkan penelitian yang bermutu, niscaya tidak akan tumbuh jika penghargaan akan dedikasi keilmuan dan penelitian belum tercipta. Di tengah kesejahteraan dan penghargaan terhadap profesi guru dan dosen yang masih belum memadai, sesungguhnya mustahil kita berharap dapat lahir peneliti yang membanggakan seperti Prof Adi Utari.

(Penulis adalah Dosen Isu-isu Masyarakat Digital Prodi S3 Ilmu-Ilmu Sosial FISIP Unair)-d

Kontak Sambungan hal 1

Di Jakarta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Bintang Puspayoga mengecam penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap nakes dan guru di Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang Papua.

Menurut Bintang, negara harus hadir dan menggunakan kekuatan yang diperlukan untuk mengeliminasi semua potensi ancaman terhadap warga Papua demi tegaknya hak asasi dan keadilan sosial di Papua. "Masyarakat khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak untuk dapat hidup aman, bebas dari segala aksi kekerasan, apalagi sampai menghilangkan nyawa," tegas Menteri. (Ati/Ant)-d

Jumlah Sambungan hal 1

mencapai 1,64 persen dengan jumlah kasus aktif mencapai 2.953 kasus. "Riwayat sementara kasus terkonfirmasi Covid-19 yaitu 70 kasus tracing kontak positif, 7 kasus periksa mandiri, 5 kasus belum ada informasi dan satu kasus skrining karyawan kesehatan," katanya.

Ditya mengatakan angka kesembuhan terus bertambah sebanyak 360 kasus dengan demikian total kasus kesembuhan di DIY mencapai 145.922 kasus. Sementara itu, kasus pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di DIY bertambah 9 kasus sehingga total kasus meninggal mencapai 5.139 kasus. "Jumlah orang yang diperiksa sampelnya di DIY 5.046 orang. Case recovery rate (CRR) atau tingkat kesembuhan sebanyak 94,75 persen dan Case Fatality Rate (CFR)," katanya. (Ria/Ira)-d



Prakiraan Cuaca		Selasa, 21 September 2021				
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					23-30	70-95
Sleman					21-30	70-95
Wates					23-30	70-95
Wonosari					23-30	70-95
Yogyakarta					23-30	70-95

Ekonomi Tayangan Pernikahan Selebritis

Star Asrita, S.I.Kom., M.A
Prodi Ilmu Komunikasi Universitas AMIKOM Yogyakarta

SEJAK terjadinya pandemi Covid 19 di Indonesia bahkan di dunia, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Berdasarkan riset Nielsen, kepemilikan televisi meningkat 13,8% dengan durasi menonton 5 jam 29 menit pada 18 Maret 2020. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan

pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat di ruang publik untuk mengurangi kerumunan. Sehingga semua orang diajarkan untuk belajar, bekerja dan beraktivitas di rumah.

Secara ekonomi aturan tersebut mungkin merugikan sebagian pihak, seperti kurang penghasilan, sepi pembeli bahkan hilangnya pekerjaan. Namun di sisi lain, kesempatan ini digunakan oleh para pemasang iklan untuk meningkatkan penjualan produk mereka. Tingginya antusias rakyat untuk menonton televisi merupakan peluang agar produk yang dipasarkan lebih laku.

Program televisi kemudian

diproduksi sedemikian rupa agar penonton betah di rumah selama pandemi. Salah satu program yang akhir-akhir ini menjadi kontroversi adalah ditayangkannya pernikahan selebritis di televisi swasta. Bahkan pernikahan tersebut disuguhkan secara langsung dan dalam waktu yang berturut turut dengan tujuan mengikuti selera pasar atau permintaan masyarakat.

Media massa sebagai pilar keempat demokrasi atau alat kontrol negara punya tanggungjawab sosial. Mereka tidak hanya menyuguhkan apa yang diinginkan publik berdasarkan rating namun juga harus memberikan kebutuhan informasi yang lebih mendidik.

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Dewasa ini, rating menjadi salah satu indikator kesuksesan sebuah program televisi. Melalui rating, pihak televisi akan membuat program yang dijadikan komoditas untuk memperoleh keuntungan.

Secara politik, pasti ada pihak yang memiliki tendensi sehingga televisi swasta rela untuk mengesampingkan kepentingan publik demi kepentingan privat. Padahal dalam peraturan KPI tentang P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standa Program Siaran), pada pasal 13 ayat 2

disebutkan bahwa program siaran tentang permasalahan kehidupan probadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan atau disajikan dalam seluruh isi mata acara kecuali demi kepentingan publik.

Sungguh ironis rasanya ketika masyarakat seringkali disuguhi acara televisi yang lebih banyak menampilkan selebritis hingga glamorisasi selebriti. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai pengawas siaran-siaran media massa seharusnya lebih memperhatikan konten yang mengekspos kehidupan pribadi seseorang. Hal tersebut harus dilakukan dengan membertimbangkan

kemanafaatan dan perlindungan kepentingan masyarakat Indonesia.

Perlu tindakan tegas agar hal serupa tidak terus terjadi dan hanya membodohi penonton. Meskipun dengan alasan selebritis tersebut melestarikan budaya karena menggunakan adat tertentu, tayangan pernikahan tidak perlu disiarkan di frekuensi publik. Masih banyak program televisi yang lebih bermutu dan mencerdaskan bangsa. Selain itu di tengah kondisi yang sulit ini, sebaiknya televisi tidak menayangkan acara selebritis yang menghambur-hamburkan uang dan lebih mengedepankan empati terhadap masyarakat. (*)